

Dana Kapitasi BPJS Dipangkas Stok Obat di Puskesmas Masih Aman



• NUSABALI/SUDIRTA
WAKIL Bupati Buleleng,
dr Nyoman Sutjidra SpOG

SINGARAJA, Nusabali

Distributor obat disinyalir memilih menolak mengantarkan obat-obatan ke beberapa Puskesmas, termasuk di Buleleng. Kondisi ini disebut lantaran dipangkasnya dana operasional pengadaan obat yang menggunakan dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dari semula Rp 6.000 menjadi Rp 3.250.

"Masalah ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Buleleng. Tetapi sudah menjadi masalah nasional. Memang terjadi pemangkasan biaya operasional," ujar Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra yang juga seorang dokter ini, Jumat (11/9).

Pemangkasan kapitasi yang merupakan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sutjidra mengatakan, dari dana kapitasi yang telah ditentukan oleh pemerintah, 60 persennya dialokasikan untuk dana jasa pelayanan dan 40 persennya dianggarkan untuk pengadaan obat-obatan.

Sejauh ini, dari 20 Puskesmas yang tersebar di Buleleng, ada dua Puskesmas yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota. Yakni Puskesmas Busungbiu II dan Gerokgak II, yang membutuhkan waktu tiga jam perjalanan untuk sampai di Puskesmas tersebut.

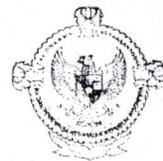
Mensiasati hal tersebut, Sutjidra pun mengatakan, tahun ini, dalam pengadaan obat, Buleleng masih menggunakan APBD, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Kendati ada masalah terkait pendistribusian obat-obatan dari pihak rekanan yang ditangani BPJS tahun ini, pihaknya menegaskan bahwa persediaan obat di masing-masing Puskesmas masih aman.

"Dengan adanya masalah tersebut, tahun ini kita masih aman. Karena pengadaan obat-obatan ke masing-masing Puskesmas, masih menggunakan APBD, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Setidaknya itu cukup sampai akhir tahun nanti," imbu dia. Ditanya soal ke depannya, pihaknya pun mengaku masih melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), BPJS, serta Kementerian Kesehatan. Mengingat masalah tersebut, merupakan masalah nasional, ia pun mengatakan pemerintah pusat saat ini sedang melakukan pengkajian ulang terkait kebijakan tersebut.

Sutjidra pun mengaku, masih menunggu kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, bulan November mendatang. "Kami masih menunggu kebijakan baru dari pengkajian ulang yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan dalam kebijakan baru nantinya dapat memberikan solusi. Mengingat masalah pengadaan obat-obatan sangat vital di dunia kesehatan yang tidak dapat ditunda-tunda," harap dia. **k23**

Edisi : Sabtu, 12 September 2015

Hal : 4



Iklan Kampanye Pilkada Badung Disiapkan Rp 500 Juta

MANGUPURA, NusaBali

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Anak Agung Raka Nakula mengatakan anggaran yang disiapkan untuk pemasangan iklan kampanye peserta pilkada di daerah itu mencapai kisaran Rp500 juta.

"Disiapkan sekitar Rp500 juta, yang dapat digunakan untuk memasang iklan kampanye di media cetak dan elektronik," kata Agung Nakula, dilansir Antara Jumat (11/9).

Menurut dia, berdasarkan Peraturan KPU No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pemasangan iklan kampanye peserta pilkada difasilitasi dan dibiayai oleh KPU. "Waktu penayangan iklan kampanye itu selama 14 hari, jadi dimulai sekitar pertengahan November mendatang," ujarnya.

Meskipun demikian, pihaknya telah meminta kepada tim sukses pasangan calon peserta pilkada agar materi iklan sudah diserahkan kepada KPU Badung paling lambat Sabtu (12/9).

"Dengan diserahkan jauh-jauh hari, kami bisa mengecek isinya sudah memenuhi ketentuan atau tidak, dan jika ternyata belum memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan, masih cukup waktu untuk dilakukan perbaikan," ucapnya.

Agung Nakula menyebut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam iklan kampanye itu tidak boleh bernada intimidasi, tidak berbau SARA, dan tidak berisi unsur provokasi.

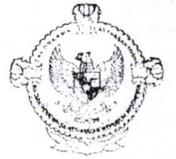
Terkait durasi penayangannya, untuk di radio setiap siaran iklan kampanye selama 60 detik dan maksimal 10 spot dan di stasiun televisi selama 30 detik.

Dengan anggaran yang disiapkan Rp500 juta itu, Agung Nakula mengatakan tidak semua media yang akan menjadi sasaran penayangan iklan karena menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki.

Pilkada Badung diikuti dua pasangan calon. Nomor urut 1 ditempati Nyoman Giri Prasta dan Ketut Suiasa yang didukung oleh PDI Perjuangan dan Nasdem. Nomor urut 2 ditempati Made Sudiana dan Nyoman Sutrisno yang didukung Partai Demokrat dan Gerindra.

Edisi : Sabtu, 12 September 2015

Hal : 16



Nusa Penida Nihil Petugas Pemadam Armada Damkar Mangkrak di Garase

SEMARAPURA, NusaBali

Kecamatan Penida, Klungkung, merupakan kawasan rentan kebakaran, terutama akibat kondisi geografisnya yang bersemak liar dan kering. Parahnya, kecamatan ini tak memiliki unit pemadam kebakaran (Damkar).

Jika ada kebakaran, warga dan aparat terkait memadamkan api secara manual dengan peralatan seadanya. Akibatnya, pemadaman api relatif lama. Risikonya, ancaman terhadap keselamatan dan kerugian material lebih tinggi.

Kalangan warga Nusa Penida mengeluhkan ketiadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran itu. "Semestinya mengingat wilayah Nusa Penida yang kritis, sarana damkar seharusnya diprioritaskan," ujar seorang warga Nusa Penida, Kamis (11/9). Apalagi lanjut warga, saat musim kemarau seperti ini, kawasan kritis di Nusa Penida, diantaranya semak-semak dan perbukitan kering, sangat gampang terba-

kar. Demikian juga, ancaman kebakaran pada pemukiman rumah warga. "Kami sangat berharap ada petugas pemadam dan peralatan untuk pemadaman api," ujarnya.

Plt Kadis PU Klungkung I Ketut Suayadnya, saat dikonfirmasi, Jumat (11/9), mengiyakan, tidak adanya Unit Damkar di Nusa Penida. Namun demikian, Tut Suad, demikian sapaan Plt Kadis PU yang sehari-hari Asisten II Pemkab Klungkung ini, menyatakan pengadaan tenaga damkar untuk di Kecamatan Nusa Penida, bisa dilakukan pada 2016. "Mudah-mudahan bisa direkrut tahun depan (2016)," katanya. Tak semata-mata rekrutmen personel damkar, namun armada damkar untuk Nusa Penida, sudah ada. Pengadaan kendaraan tersebut dilakukan 2015 ini. "Sementara tidak ada yang mengoperasikan, kita taruh di sini (Dinas PU Klungkung, Red)," ujar Suayadnya. Ditegaskan satu unit mobil damkar tersebut, baru untuk di Nusa Gede (Nusa Penida, Red). Sedangkan, Lembongan

dan Ceningan, belum dapat jatah mobil damkar.

Kasi Damkar Dinas PU Klungkung I Wayan Toya, menambahkan mobil damkar seharga Rp 1,09 miliar sudah ada. Pengadaan armada tersebut, kata Toya, untukantisipasi peristiwa kebakaran di Nusa Penida. "Jika ada tenaga untuk itu, nanti akan training dulu di sini (Seksi Damkar Dinas PU, Red)," tambah Toya.

Dari catatan Seksi Damkar Dinas PU, di Klungkung terbilang sering terjadi kebakaran. Pada 2014 tercatat ada 33 laporan kebakaran. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kebakaran lahan/semak. Selain itu di Klungkung juga pernah terjadi kebakaran hebat, yakni kebakaran yang menimpa Pura Penataran Agung di Banjar Sengguan, Kelurahan Kangin, pada akhir Juli 2009, serta kebakaran Pura Bukit Buluh 2011. Kebakaran yang melanda kedua pura ini menyebabkan semua bangunan ludes. Sampai sekarang, pembangunan pada dua pura itu masih berlangsung. **k17**

Edisi : Sabtu, 12 September 2015

Hal : 6



Proyek Pembangunan Long Storage

Muara Tukad Mati

Pemprov dan Badung

Mulai Sepaham



TERTUNDANYA proyek pembangunan long storage di muara Tukad Mati wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, yang dihentikan sementara beberapa waktu lalu, mulai mendapat sinyal bagus untuk dilanjutkan kembali. Gubernur Pastika telah bersurat ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk kelanjutan proyek tersebut.

Surat Gubernur Pastika kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berisi tiga poin, yang intinya penegasan soal kelanjutan proyek.

MANGUPURA, NusaBali

Tertundanya pengerjaan proyek pembangunan long storage muara Tukad Mati, wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, menimbulkan kecaman banyak pihak. Namun belakangan Dinas Kehutanan Provinsi Bali yang menghentikan proyek itu mulai 'melunak'. Bahkan kabar terakhir antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung selaku pemilik proyek sudah terjalin.

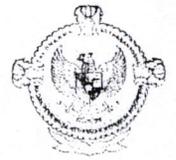
Hal itu ditunjukkan dengan keluarnya surat yang ditandatangani

Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Nomor 522/1017/Dishut-4 tertanggal 7 September 2015. Isi surat yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia itu perihal pengajuan permohonan penegasan pembangunan long storage.

Isi surat tersebut, Pastika menindaklanjuti Surat Bupati Badung Nomor 610/3740/Sekret, tanggal 4 September 2015 dan memperhatikan Surat Direk-

Edisi : Sabtu, 12 September 2015

Hal : 2



Sambungan - - -

tur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor S.431/VII-KKBLH/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Normalisasi

Tukad Mati di Blok Perlindungan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kabupaten Badung. Intinya bagaimana pembangunan long storage dilanjutkan.

Ada tiga poin penting yang disampaikan Pastika sesuai isi surat yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pertama, berdasarkan kajian teknis bahwa penyempitan alur sungai Tukad Mati oleh sedimentasi dan sampah telah mengakibatkan banjir pada setiap musim hujan di kawasan pariwisata Kuta, sehingga kegiatan penataan alur sungai amat mendesak untuk segera dilakukan.

Kedua, mengingat areal tersebut masuk dalam blok perlindungan Tahura Ngurah Rai, sehingga perlu diadakan revisi perubahan blok dan kerjasama yang saat ini sedang dikerjakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali.

Ketiga, sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat rencana pengelolaan Tahura Ngurah Rai Tahun 2012 ditetapkan/disahkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), maka pihaknya mohon sebelum diselesaikan revisi perubahan blok dan kerjasama ada penegasan bahwa pelaksanaan pembangunan long storage di muara Tukad

Mati di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dapat dilaksanakan.

Langkah Gubernur Pastika disambut baik Pemkab Badung. Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) AA Gde Dalem, Jumat (11/9), menyatakan, pembangunan long storage untuk mengantisipasi dampak banjir di kawasan pariwisata Kuta sudah mendapat lampu hijau. Terutama dari pihak Pemprov Bali yang sebelumnya melalui Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Bali menghentikan sepihak proyek tersebut.

"Sekarang mulai ada kesepahaman. Surat yang kami terima dari

provinsi, Pak Gubernur secara resmi bersurat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Intinya memohon perubahan blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan," ucapnya.

Dikatakannya, tidak hanya berkaitan dengan perubahan blok yang menjadi titik poin isi surat Gubernur, poin pentingnya adalah pada poin ketiga yakni meminta penegasan pelaksanaan pembangunan long storage di muara Tukad Mati di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dapat dilaksanakan, sambil menunggu selesainya revisi perubahan blok; dari blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan.

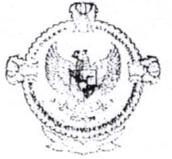
"Yang kami tangkap seperti itu. Artinya sekali lagi kami tegaskan mulai ada kesepahaman bahwa proyek ini untuk penanggulangan banjir," kata Gung Dalem.

Kapan proyek akan dilanjutkan? Gung Dalem tidak memberikan kepastian. Mengingat pihaknya pun berencana meminta penegasan serupa ke pusat. Jika surat penegasan telah dikantongi, makanya pihaknya bisa yakin untuk melanjutkan proyek yang menelan anggaran Rp 47 miliar tersebut. "Iya sambil menunggu itu (perubahan revisi) kami bisa melanjutkan proyek. Tapi kami tunggu penegasan dulu," tandasnya.

Sebelumnya, Pemkab Badung dalam isi suratnya yang diajukan ke Pemprov Bali meminta perubahan blok sesuai dengan proyek yang kini dikerjakan di lapangan. Yang diminta dilakukan perubahan sepanjang 1.700 meter dengan lebar 50 meter. **as**

Edisi : Sabtu, 12 September 2015

Hal : 2



Soal Pabrik Pencampuran Beton Cor Dewan *Warning* Tim Investasi

SINGARAJA, NusaBali

Tim investasi Pemkab Buleleng kini diwanti-wanti dalam buat kajian atas keberadaan pabrik pencampuran beton cor di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan. Masalahnya, lokasi pabrik merupakan kawasan tujuan wisata dan budidaya sesuai Perda RTRW Kabupaten. "Kami ingatkan tim investasi, bahwa Desa Bungkulan bukan kawasan campuran. Itu adalah kawasan tujuan wisata dan budidaya. Dalam Perda RTRW, tidak ada disebutkan suatu daerah menjadi kawasan campuran," tegas Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Ketut Susila Umbara, kepada NusaBali di Singaraja, Jumat (11/9).

Menurut Susila, menyebutkan Desa Bungkulan sebagai kawasan campuran adalah sebutan yang dicari-cari oleh tim investasi. Ia menduga, alasan itu sengaja dicari untuk meloloskan izin prinsip dari pabrik pencampuran beton cor tersebut. "Sekarang kan bisa kelihatan siapa yang bermain. Kami tetap tegas lokasinya itu telah menyalahi Perda RTRW," tandas politisi Partai Golkar asal Desa Panji, Kecamatan Sukasada ini.

Ketut Susila bersama Wakil Ketua dari Partai Demokrat, I Made Adi Purnawijaya sejak awal ngotot menyoroti keberadaan pabrik pencampuran beton cor tersebut. Keduanya menilai, keberadaan pabrik tersebut di Desa Bungkulan telah melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW, Desa Bungkulan termasuk kawasan budidaya dan daerah tujuan pariwisata. Di samping itu, keduanya juga

menilai, Pemkab Buleleng banyak dirugikan oleh pabrik pembuatan campuran beton cor tersebut

Selain merugikan lingkungan, juga dari sisi pendapatan izin maupun retribusi. Keduanya menafsir, kerugian itu mencapai miliaran rupiah. "Ini kan salah besar kalau tetap diberikan beroperasi tanpa izin, karena mereka itu berbisnis jelas yang dirugikan itu daerah. Oke lah kalau untuk mendukung proyek lainnya, tapi kan itu juga bisnis dan pabrik itu sudah beroperasi sejak bulan Mei lalu," tegasnya.

Tim investasi Pemkab Buleleng sudah turun mengecek kebenaran dokumen permohonan izin prinsip dari pabrik pencampuran beton cor tersebut, pada Kamis (10/9) pagi. Sekretaris Tim Ketut Suparto mengatakan, pihaknya hanya ingin mendapatkan data dan fakta terkait aktivitas usaha yang dijalankan perusahaan. Data ini menyangkut beberapa hal teknis termasuk pengamatan di lapangan serta meminta keterangan dari pihak penyanding di sekitar lokasi perusahaan. Penelusuran ke lapangan ini menjadi salah satu tahapan sebelum nantinya tim investasi menyerahkan seluruh berkas permohonan izin prinsip kepada Bupati.

"Tim akan merapatkan kembali untuk mengkaji hasil penelusurannya. Data di lapangan dan berkas persyaratan yang diajukan itu akan diajukan kepada Bupati melalui Asisten II dan Sekkab untuk diambil keputusan oleh Bupati," tegasnya. **k19**

Edisi : Sabtu, 12 September 2015

Hal : 4